

**SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN  
KUMUH DI KECAMATAN KEMAYORAN  
JAKARTA PUSAT**

**RINGKASAN TESIS**

Oleh :

**BUDIYONO  
NIM L4D006075**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN  
KUMUH DI KECAMATAN KEMAYORAN  
JAKARTA PUSAT**

**RINGKASAN TESIS**

Oleh :

**BUDIYONO**  
NIM L4D006075

**Pembimbing I :**

**Ir. HOLI BINA WIJAYA, MUM**

**Pembimbing II :**

**Ir. RINA KURNIATI, MT.**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

# **SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH DI KECAMATAN KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

**Oleh : BUDIYONO**

## ***A b s t r a k***

*Pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar yang sangat mendasar, yaitu krisis ekonomi, era globalisasi dan otonomi daerah. Karena hal tersebut, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional. Disamping kondisi masyarakat Indonesia yang sangat kompleks baik dipandang dari segi ekonomi maupun strata sosial. Masyarakat kawasan kumuh, pendidikan formal dan informal kurang memberikan kepuasan akan kebutuhan pendidikan yang diperlukan. Masyarakat kawasan kumuh dengan segala kekurangannya, mengikuti pendidikan non formal menjadi sebuah masalah besar. Hal ini disebabkan belum tersedia sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat pada kawasan kumuh.*

*Untuk menentukan sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh, dilakukan penelitian yang tersusun dalam sebuah tesis yang berjudul “Sistem Pendidikan Non Formal pada Kawasan Kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat”. Tesis ini bertujuan untuk menentukan jenis sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat kawasan kumuh. Hal yang dilakukan adalah menganalisis komponen sistem pendidikan non formal dan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Sedangkan sasaran penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi sekaligus analisis komponen sistem pendidikan non formal dan komponen masyarakat kawasan kumuh.*

*Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pendekatan analisis kualitatif. Data didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Nara sumber dalam penelitian ini 33 orang dari masyarakat kawasan kumuh, pemerintah dan LSM yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Analisis akan dilakukan terhadap komponen sistem pendidikan non formal dan komponen-komponen masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.*

*Kesimpulan penelitian ini bahwa sistem pendidikan non formal eksisting pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada lingkungan sosial budaya. Artinya sistem pendidikan non formal yang mempunyai program dan kegiatan di sesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya. Jika lembaga pendidikan non formal berada pada masyarakat perkotaan, maka program diarahkan pada bidang yang cepat terkena dampak perkembangan ilmu dan teknologi.*

*Kondisi masyarakat kawasan kumuh dengan keterbatasan akses ke pendidikan formal, pendidikan non formal adalah sebuah pilihan ideal. Namun jenis pendidikan non formal yang disediakan adalah sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi*

masyarakatnya. Sistem pendidikan non formal yang sesuai adalah sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, yaitu sistem pendidikan yang bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan sesuai dengan kemauan, kemampuan, karakteristik dan kondisi masyarakat.

**Rekomendasi** : seyogyanya pemerintah daerah dan masyarakat menerapkan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, dengan demikian, diharapkan masyarakat kawasan kumuh mendapatkan layanan pendidikan dengan baik.

**Kata kunci**: sistem pendidikan non formal, kawasan kumuh

## PENDAHULUAN

Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan yang sangat besar. Tantangan pertama adalah akibat krisis ekonomi, dimana dunia pendidikan dituntut untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, mengantisipasi era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud suatu proses pendidikan yang lebih demokratis, dengan memperhatikan keberagaman kebutuhan dan keadaan daerah, peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah telah meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan formal.

Sementara itu kondisi masyarakat yang sangat kompleks baik dipandang dari segi ekonomi maupun strata sosial, pendidikan formal dan informal kurang memberikan kepuasan pada setiap manusia akan kebutuhan pendidikan yang diperlukan. Kebutuhan akan pengetahuan yang dapat diperoleh melalui keterampilan membaca, tulis dan berhitung serta memahami berbagai lambang digit dan ikon pendidikan lainnya menjadi mutlak yang kurang bisa dipenuhi pada pendidikan formal.

Masyarakat kawasan kumuh, yang biasanya memiliki karakteristik kurang beruntung dari segi ekonomi, lebih memilih dan menekankan kebutuhan keterampilan yang memudahkan orang bergerak dalam jenjang dan jangkauan pekerjaan serta penghidupan yang lebih luas. Hal ini menyebabkan pendidikan formal kurang dibutuhkan oleh masyarakat kawasan kumuh. Selain karena keterbatasan aksesibilitas untuk menjangkau pendidikan formal, masyarakat kawasan kumuh lebih memilih pendidikan non formal. Apalagi dengan adanya perluasan kesempatan anak didik menjadi tenaga berpendidikan yang terlatih. Hal ini merupakan faktor yang tidak bisa dikerjakan oleh pendidikan formal.

Dengan melihat kegagalan penerapan pendidikan formal dan betapa unggulnya pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh, maka perlu dilakukan pengembangan dan usaha mendorong masyarakat kawasan kumuh untuk menempuh pendidikan non formal.

Ironis dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Masyarakat kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat telah hilang minat belajar ke pendidikan non formal. Hal ini diakibatkan oleh minim dukungan atau motivasi keluarga, kesempatan dan akses masyarakat kawasan kumuh untuk menempuh pendidikan non formal. Disamping masih jarang lembaga pendidikan non formal yang membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya banyak lembaga pendidikan non formal yang tidak mendapatkan warga belajar atau minim warga belajar.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap sistem pendidikan non formal di lembaga pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

1. Sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :
2. Melakukan identifikasi sistem pendidikan non formal pada lembaga pendidikan non formal, dengan sub sarasannya meliputi:
  - Identifikasi layanan pendidikan non formal;
  - Identifikasi lokasi pendidikan non formal;
  - Identifikasi komponen sistem pendidikan non formal;
2. Melakukan identifikasi masyarakat kawasan kumuh, sub sarasannya meliputi:
  - Identifikasi sistem aktivitas masyarakat kawasan kumuh;
  - Identifikasi kondisi kependudukan masyarakat kawasan kumuh;
  - Identifikasi latar belakang pendidikan masyarakat kawasan kumuh;
  - Identifikasi sosial ekonomi masyarakat kawasan kumuh
3. Melakukan analisis sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
4. Menyimpulkan sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.

#### **SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH**

Ada empat teori pendidikan, antara lain: (1). Pendidikan klasik (classical education). Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik, seperti perenialisme, essentialisme, dan eksistensialisme yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. (2) Pendidikan pribadi (personalized education). Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. (3). Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan, lebih mengutamakan pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam konsep teknologi pendidikan, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa data-data obyektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vocational. (4) Pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya (Sukmadinata, 1997:15-17).

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat. Pendidikan non formal berada antara pendidikan formal dan pendidikan in formal (Joesoef, 2004:79). Dalam hal lain didefinisikan bahwa pendidikan non formal adalah bagian dari pendidikan luar sekolah yang memiliki peraturan-peraturan yang tetap dan ada yang terorganisir dan ada pula yang tidak terorganisir yang berupa pendidikan sosial (Siagian, 2003:56).

Berpedoman dari dua teori tersebut, maka yang dimaksud dengan pendidikan non formal dalam penelitian ini adalah pendidikan yang merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang dengan sadar dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan non formal yang

mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, terorganisir dan memiliki fleksibilitas tinggi dalam hal pelaksanaan.

Disamping adanya tugas yang sama antara pendidikan formal dengan pendidikan non formal, maka pendidikan non formal mempunyai sifat-sifat yang lebih dari pada pendidikan formal yaitu: (a) Lebih fleksibel dalam arti luas seperti tidak ada tuntutan syarat credential yang keras bagi anak didiknya, waktu penyelenggaraan disesuaikan dengan kesempatan yang ada artinya dapat beberapa bulan, beberapa tahun atau beberapa hari saja. Dari segi tujuan, pendidikan non formal dapat luas tujuannya, dan bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan. Sedang para pengajarnya, juga tidak perlu syarat-syarat yang ketat, hanya dalam pelajaran yang diberikan ia lebih dari murid-muridnya serta metode dapat disesuaikan dengan besarnya kelas. (b) Lebih efektif dan efisien untuk bidang-bidang pelajaran tertentu. Bersifat efektif oleh karena program pendidikan non formal bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tidak memerlukan syarat-syarat (guru, metode fasilitas lain) secara ketat, dan tempat penyelenggaraan dimana saja seperti di sawah, bengkel, rumah, pasar, tempat kerja dll; (c) Pendidikan non formal bersifat quick yielding artinya dalam waktu yang singkat dapat digunakan untuk melatih tenaga kerja yang dibutuhkan, terutama untuk memperoleh tenaga yang memiliki kecakapan; (d) Pendidikan non formal sangat instrumental artinya pendidikan yang bersangkutan bersifat luwes, mudah dan murah serta dapat menghasilkan waktu yang relatif singkat (Joesoef: 2004:103).

Komponen-komponen pendidikan non formal adalah sebagai berikut: (a). Tujuan dan prioritas, untuk mengarahkan suatu sistem yang berupa informasi tentang apa yang hendak dicapai dan prioritas apa yang didahulukan untuk mencapai tujuan dari terbentuknya sistem pendidikan non formal. (b) Peserta didik atau sering di sebut warga belajar. Peserta didik adalah komponen yang diharapkan nantinya mengalami proses perubahan tingkah laku sesuai dengan tujuan pendidikan non formal. (c) c. Cara menyampaikan atau metode. Merupakan cara mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menjalankan sistem pendidikan non formal untuk mencapai tujuannya. (d) Struktur dan jadwal waktu. Merupakan alur untuk mengatur pembagian, pemilihan waktu dalam melaksanakan kegiatan. (e) . Isi dan bahan pengajaran. Merupakan materi yang fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai warga belajar. (f). Guru atau tutor dan pelaksana. Merupakan subjek yang akan menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. (g). Fasilitas atau sarana dan prasarana. Merupakan alat dan tempat terselenggaranya proses pendidikan (Ahmadi, 2003:164).

Jika ditinjau dari program, karakteristik dan sasaran, maka sistem pendidikan non formal diklasifikasikan menjadi beberapa jenis antara lain: (1) . Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, adalah sistem pendidikan non formal yang bersifat melayani. Artinya lembaga pendidikan non formal bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan, fasilitas dan tutor sesuai dengan kemauan, kemampuan, kenyamanan, karakteristik dan kondisi masyarakat. (2). Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada lingkungan sosial budaya, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang programnya disesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya. Jika lembaganya berada di masyarakat pedesaan, maka program diarahkan pada program-program mata pencarian misalnya pertanian dan pendayagunaan sumber-sumber alam, jika lembaganya berada di masyarakat perkotaan, maka program diarahkan pada program-program yang cepat terkena dampak perkembangan ilmu dan teknologi, jIka lembaganya berada di masyarakat terpencil dan terasing, maka program diarahkan pada program-program yang ada di daerah terpencil dan terasing tersebut, misalnya memahat, menyulam dll. (3). Sistem pendidikan non formal yang didasarkan

pada kekhususan sasaran pelajaran, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang memiliki program khusus menangani peserta didik yang memiliki kekhususan, antara lain: Program yang khusus menangani peserta didik yang dapat digolongkan terlantar, seperti anak yatim piatu, program yang khusus menangani peserta didik yang mengalami perkembangan sosial dan emosional seperti anak nakal, korban narkoba dan wanita tuna susila, program yang khusus menangani peserta didik yang mengalami cacat mental dan cacat tubuh seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna mental, program yang khusus menangani peserta didik yang karena sebab sosial tidak dapat mengikuti program pendidikan persekolahan. (4). Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pranata, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang programnya diarahkan untuk menangani pranata antara lain. Program pendidikan keluarga, yaitu pendidikan non formal yang mengembangkan peserta didik untuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai moral, pandangan dan sikap hidup, ketrampilan dan kreativitas, program pendidikan perluasan wawasan, yaitu pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan berfikir, menambah pengetahuan, dan memperluas cakrawala tentang kehidupan berbangsa dan berkeluarga, pProgram pendidikan ketrampilan dalam rangka mengembangkan profesionalisme pekerjaan sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa guna meningkatkan taraf hidup. (5).

Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada segi pelembagaan program, adalah suatu sistem pendidikan non formal yang programnya diarahkan keseluruhan proses pengintegrasian antara program pendidikan non formal dengan pembangunan masyarakat, misalnya program antar sektoral dan swadaya masyarakat seperti PKK, PKN, P2WKSS, perencanaan desa dan program-program pembangunan desa lainnya (Sudarmadi, 1993: 121)

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya (Suparlan:1996:14).

Ciri-ciri pemukiman kumuh adalah: 1) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai; 2) Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin; 3) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang yang ada, sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya; 4) Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas; 5) Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. 6) Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor informal (Suparlan: 1996:35).

Sedangkan ciri-ciri masyarakat kumuh adalah sebagai berikut: 1) Pendapatan rendah; 2) Pengetahuan rendah; 3) Pendidikan rendah; 4) Kepedulian terhadap lingkungan rendah; 5) Mudah terjadi konflik; 6) Mata pencaharian pada umumnya pada sektor informal; 7) Solidaritas tinggi; 8) Kurang gizi.

Banyak pendapat dari para ahli yang mengatakan bahwa tumbuh dan menjamurnya kawasan kumuh di perkotaan faktor penyebab utamanya adalah tekanan ekonomi, tingkat kepadatan penduduk di kota, proses urbanisasi, dan keterbatasan lahan di kota (Todaro, 1998:122).

Penyebab adanya kawasan kumuh atau peningkatan jumlah kawasan kumuh yang ada di kota adalah: (1).Faktor ekonomi: Faktor ekonomi atau kemiskinan menjadi pendorong bagi pendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota. Dengan keterbatasan pengetahuan, ketrampilan, modal, maupun adanya persaingan yang sangat ketat sesama pendatang, maka pendatang hanya dapat tinggal dan membangun rumah dengan kondisi yang sangat minim di kota. Disisi lain pertambahan jumlah pendatang yang sangat banyak mengakibatkan pemerintah tidak mampu untuk menyediakan hunian yang layak. (2). Faktor bencana Faktor bencana dapat pula menjadi salah satu pendorong perluasan kawasan kumuh. Adanya bencana, baik bencana alam seperti banjir, gempa, gunung meletus, longsor maupun bencana akibat perang atau pertikaian antar suku juga menjadi penyebab jumlah rumah kumuh meningkat dengan cepat (Todaro, 1998:140).

Untuk mengidentifikasi jenis atau tipe kawasan permukiman kumuh maka dilakukan penggolongan atau klasifikasi. Hal ini digunakan sebagai langkah dalam penanganan selanjutnya pada kawasan tersebut agar mudah menemukannya dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di kawasan permukiman kumuh.

Kawasan kumuh diklasifikasikan berdasarkan pada karakter fisik dan aspek legalitasnya. Ada dua jenis permukiman kumuh yaitu: a) Kategori Slum, yaitu kawasan kumuh tetapi diakui absah sebagai daerah permukiman; b) Kategori Squatter Settlement, yaitu: pemukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk kawasan hunian, misalnya: di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya. Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (squatter) ini umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya, misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara (Budihardjo, 1997: 106).

Usaha pemerintah menuntaskan rencana strategis dalam bidang non pendidikan formal adalah dengan menterjemahkan misi-misi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Misi tersebut antara lain: mendorong terwujudnya kelembagaan kursus dan kursus para-profesi yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang semakin meluas, adil dan merata, khususnya bagi penduduk miskin dan penganggur terdidik, dapat bekerja dan atau berusaha secara produktif, mandiri dan profesional (Direktorat Jenderal PLS, 2007)

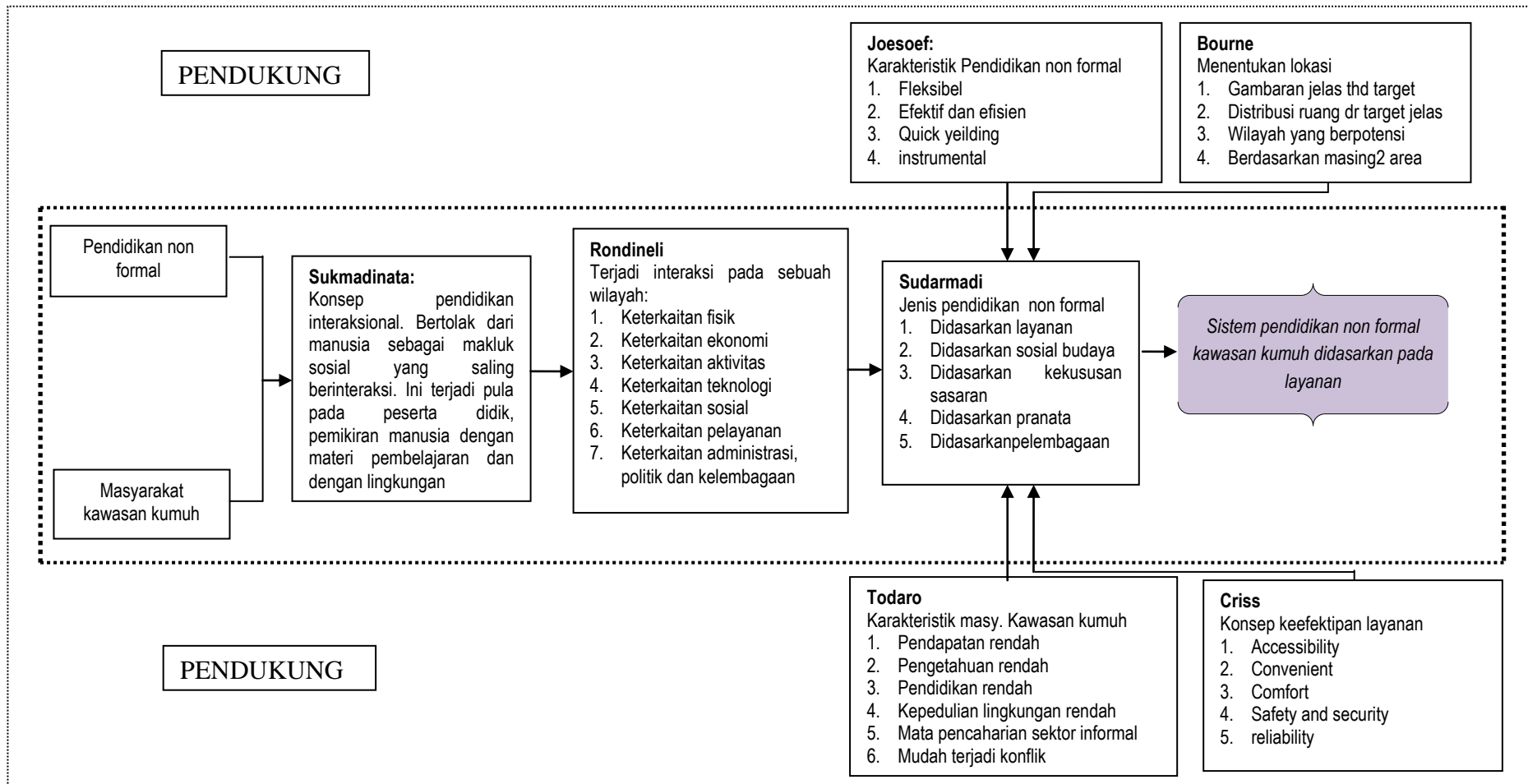
Ciri-ciri masyarakat kumuh ditandai dengan ketidak berdayaan dari segi ekonomi. Masyarakatnya berpenghasilan rendah dengan jumlah keluarga yang besar, sehingga unit kost masing-masing jiwa menjadi sangat rendah. Biasanya penghasilan yang didapatkan sebagian besar hanya untuk mencukupi kebutuhan primer, yaitu makan. Sedangkan kebutuhan lain seperti sandang dan papan kurang mendapat porsi. Apalagi untuk kebutuhan pendidikan, sangat jauh dari keterjangkauan, yang mengakibatkan sangat banyak anak usia sekolah pada kawasan kumuh tidak dapat mengakses pendidikan baik formal maupun non formal.

Sistem pendidikan non formal pada suatu wilayah ditentukan oleh peranan stakeholder pendidikan non formal pada wilayah tersebut yang dapat menempatkan diri sesuai fungsi komponen pendidikan non formal pada masing-masing wilayah (Hamalik, 2005: 54).

Pembangunan pendidikan pada kawasan kumuh akan berada dalam penataan ruang suatu wilayah, dimana model dan jenisnya tergantung kepada keberadaan perkembangan penduduk dan mempunyai struktur, kultural budaya, tanah, pembiayaan dan bentuk yang berbeda-beda, yang akan menjadikan ciri tersendiri suatu kota.

Perkembangan pembangunan sarana pendidikan (sekolah) yang merupakan bagian-bagian kota tidaklah sama. Pembangunan sekolah tergantung pada karakteristik dan kebutuhan masyarakat, potensial sumber daya, kondisi fisik alam serta fasilitas kota terutama berkaitan dengan prasarana tersebut (Herlianto, 2002:132).





Sumber : Analisis peneliti, 2008.

**GAMBAR. 2.4**  
**KONSEP PENDEKATAN SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL KAWASAN KUMUH**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang sesuai digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2008:68). Penelitian kualitatif dilandasi oleh pemikiran rasionalistik yang menghendaki adanya pembahasan holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna di balik fakta empiris.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merupakan pemaknaan dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, sistem pendidikan non formal pada masyarakat di kawasan kumuh merupakan bentuk dari interaksi sosial yang lebih tepat dipandang secara rasional dan dapat diteliti dengan cara kualitatif.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, merupakan teknik analisis yang mentransformasikan data mentah kedalam bentuk data yang mudah dimengerti dan diinterpretasikan, serta menyusun, memanipulasi dan menyajikan data menjadi suatu informasi yang jelas (Kusmayadi, 2000:178).

Sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian, maka pengolahan data akan dilakukan sebagai berikut: (1). Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan-tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). (2). Klasifikasi. Merupakan kegiatan penggolongan data yang diperoleh melalui kegiatan survai ke dalam kelompok data berdasarkan sumber dan kategori tertentu. Klasifikasi dilakukan dengan memberikan kode pada data-data yang diperoleh. (3). Verifikasi. Merupakan kegiatan pemeriksaan data secara umum dengan mengacu kepada daftar kebutuhan data yang telah disusun sebelumnya. Untuk memudahkan kegiatan verifikasi data akan disusun tabel daftar periksa (checklist). Dalam verifikasi data, peneliti melakukan pengecekan informasi antar responden, dengan pihak-pihak yang terkait. (4). Validasi. Dalam kegiatan ini, data-data yang telah terkumpul kemudian dinilai apakah data-data yang sudah ada cukup valid dan representatif mewakili kondisi yang diamati. (5). Tabulasi. Proses tabulasi merupakan proses akhir dalam penyusunan data agar mudah dibaca, dimengerti dan digunakan sesuai dengan tujuan penelitian (Kartono, 1996).

Selengkapnya ketiga teknik pengumpulan data yang digabungkan dan akan dilakukan adalah sebagai berikut: (1). Teknik Dokumentasi. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008: 328). Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data sekunder yang diperlukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, serta bukti otentik dari penelitian yang ada kaitannya dengan sistem pendidikan non formal pada masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. (2). Teknik Wawancara Semiterstruktur (Semistructure interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview atau interview mendalam, dimana dalam pelaksanaannya pihak yang diajak wawancara atau narasumber diminta pendapat dan ide-ide lainnya. Peneliti dapat menggunakan pedoman wawancara yang terbuka atau sebagian menggunakan pilihan jawaban. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka (Sugiyono, 2008: 320). Teknik ini dilakukan agar kiranya nara sumber dapat menyampaikan permasalahan dan memberikan pendapatnya secara lebih terbuka, namun tetap pada permasalahan yang dibawa oleh peneliti, yaitu tentang sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. (3). Observasi Tersamar. Metode survei yang dilakukan adalah dengan metode observasi tersamar, dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang

aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan survei, hal ini untuk menghindari kalau mungkin data yang dicari masih dirahasiakan oleh nara sumber. Kemungkinan kalau dirahasiakan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan survei (Sugiyono, 2008:312).

Nara sumber dalam penelitian dipilih dari pihak-pihak yang terkait dengan kawasan kumuh dan pendidikan non formal di Jakarta Pusat, dengan pengambilan sampel menggunakan metode gabungan antara snowball sampling dan purposive sampling (pemilihan sampel secara bertujuan). Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.

Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2008:300). Sedangkan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2008:300). Sedangkan metode gabungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, bahwa dalam menentukan sumber data yang pertama dilakukan dengan memilih dengan pertimbangan kriteria tertentu, kemudian nara sumber berikutnya ditunjuk oleh nara sumber pertama, namun tetap mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ada. Adapun kriteria-kriteria nara sumber yang akan menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat pada kawasan kumuh yang memiliki anak usia sekolah;
2. Pemerintah, yaitu instansi yang menangani baik langsung maupun tidak langsung pendidikan non formal di Jakarta Pusat;
3. Organisasi kemasyarakatan yang terlibat langsung dengan pendidikan non formal;
4. Lembaga pendidikan non formal yang berada pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat;
5. Anak usia sekolah yang berada pada kawasan kumuh di Jakarta Pusat.

## **TINJAUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT.**

Sistem Aktivitas Sosial Masyarakat Kawasan Kumuh di Kemayoran. Penduduk berjenis kelamin pria pada kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat sebagian besar bekerja sebagai penjual jasa (tukang bersih-bersih, kuli panggul, dll), buruh dan pedagang kecil. Lokasi tempat kerja mereka berada di sekitar wilayah permukiman. Sedangkan sebagian kecil bekerja sebagai pemungut barang bekas atau pemulung.

Disamping bekerja, aktivitas masyarakat kawasan kumuh disela-sela kesibukannya sebagian kecil melakukan kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian di mushola, acara tujuh belasan, kondangan, dan hajatan. Tempat-tempat berkumpul tidak ada lagi. Hal ini mengakibatkan kegiatan sosial kemasyarakatan warga kawasan ini yang semula banyak dilakukan, seperti gotong royong, pertemuan rutin, sekarang hampir tidak pernah mereka lakukan lagi.

Jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Kemayoran menurut lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga sebagian besar tidak bekerja atau pengangguran. Sebanyak 1.925 kepala keluarga rumah tangga miskin tidak memiliki pekerjaan tetap.

Kawasan kumuh di lima kecamatan di Jakarta Pusat umumnya memiliki karakteristik fisik dan kemasyarakatan yang sama. Selain dihuni oleh para penduduk desa atau dari kota yang lebih kecil yang sengaja berpindah atau datang menetap di kota, biasanya merupakan dampak ikutan dari suatu perkembangan perekonomian yang begitu pesat dari suatu kota.

Kepala Suku Dinas Bina Mental dan Kesejahteraan Sosial Jakarta Pusat, dalam bukunya Pembinaan Mental Sosial Masyarakat Jakarta Pusat, menyatakan bahwa karakteristik kawasan kumuh di Jakarta Pusat secara fisik maupun kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Penduduk sangat padat lebih dari 1000 jiwa/ha.

2. Sebagian besar lokasinya berada di pusat kegiatan ekonomi kota.
3. Pola pemikiran, bahwa membuat hunian harus lebih dekat dengan pasar atau pusat kegiatan ekonomi lebih baik.
4. Komunitas masyarakatnya berdesakan di rumah-rumah petak.
5. Jalan-jalan sempit, terkadang tersembunyi di balik atap rumah yang bersinggungan satu sama lain.
6. Kondisi jalan masih berupa jalan tanah.
7. Fasilitas drainase tidak memadai, bahkan terdapat jalan tanpa fasilitas drainase, sehingga mudah berakibat banjir.
8. Kondisi kualitas udara yang tidak baik (kualitas udara menurun), karena tidak adanya ruang terbuka (open space), sehingga air hujan tak dapat terserap masuk ke dalam tanah yang mengakibatkan kekurangan air tanah dan mengakibatkan air hujan mengalir dengan debit yang melimpah dan akhirnya mengakibatkan banjir.
9. Pengkondisian udara di dalam rumah yang tidak baik, sehingga sirkulasi udara di dalam rumah tidak dapat mengalir dengan baik, yang berakibat mengganggu kesehatan.
10. Tidak adanya suasana “privacy (pribadi)” bagi pemilik rumah, karena jumlah ruang di rumah tinggalnya terbatas.
11. Fasilitas pembuangan air kotor/tinja sangat minim. Ada diantaranya yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah. Ada juga yang langsung membuang ke sungai terdekat.
12. Fasilitas sumber air bersih sangat minim, sebagian besar memanfaatkan air sumur dangkal yang sudah tercemar atau menampung air hujan dan bahkan membeli air bersih.
13. Tata bangunan yang sangat tidak teratur, umumnya bangunan-bangunan yang tidak permanen dan malahan terlihat banyak dalam kondisi bangunan darurat.
14. Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih merupakan tanah negara dan para pemiliknya tidak memiliki status apa-apa.

### **Pendidikan di Kemayoran Jakarta Pusat**

Beberapa sekolah yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat antara lain adalah SMKN 21 Jakarta. Terletak di kelurahan Kebon Kosong yang merupakan kawasan kumuh paling luas di Jakarta Pusat. Pada sekolah SMKN 21, Pada tahun 2007 terdapat sebanyak 554 siswa. Terdiri dari kelas satu sebanyak 200 siswa, kelas dua sebanyak 172 siswa dan kelas tiga sebanyak 172 siswa. Sedangkan yang berasal dari lingkungan sekolah tersebut (kawasan kumuh) adalah sebanyak 210 atau sekitar 38 % dari jumlah keseluruhan siswa (Data Pendidikan, 2007:8).

Disamping sekolah formal, pemerintah juga telah menciptakan beberapa sekolah non formal atau yang sering disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan beberapa lembaga kursus. Sekolah ini diharapkan dapat menampung anak usia sekolah yang telah drop out atau putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Ada sedikit kelonggaran belajar di PKBM dan lembaga kursus, karena siswa dan guru dapat melakukan perjanjian kapan harus belajar dan kapan tidak harus belajar. Namun sistem ini rupanya belum diterapkan dengan sungguh-sungguh. Terbukti dengan masih banyaknya anak usia sekolah yang belum dapat mengakses pendidikan non formal ini.

Selain pusat kegiatan belajar masyarakat, di Kecamatan Kemayoran terdapat 12 lembaga kursus yang siap menampung warga belajar di wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Lembaga kursus tersebut tersebar di sekitar kawasan kumuh, namun kalau ditinjau dari jarak antara lokasi lembaga kursus dengan kawasan kumuh masih sangat terjangkau. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 254 peserta belajar yang terdaftar di lembaga kursus pada kawasan kumuh. Dan hanya 10 % atau sekitar 7 orang yang berasal dari masyarakat kawasan kumuh (Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Jakarta Pusat, 2008).

Permasalahan umum masyarakat kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dalam bidang pendidikan non formal dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Belum tersedia lembaga pendidikan non formal yang memiliki program yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, seperti anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas;
2. Sebagian besar lembaga pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh, memiliki program yang berhubungan dengan perkembangan teknologi. Seperti halnya komputer, jaringan (LAN), service handphone garmen dan kecantikan;
3. Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar tidak sesuai dengan waktu senggang masyarakat pada kawasan kumuh. Dimana waktu senggang masyarakat kawasan kumuh antara jam 16.00-22.00 WIB. Karena kesibukan pada jam tersebut, membuat masyarakat kawasan kumuh tidak dapat mengikuti program tersebut;
4. Kurang kesiapan lembaga pendidikan untuk membuka program sekaligus menyesuaikan waktu pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat. Tingginya biaya kursus yang diminta oleh lembaga pendidikan non formal yang ada (satu program keahlian berkisar antara Rp.300.000 – Rp.1.500.000);
5. Lembaga pendidikan non formal yang mempunyai program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kawasan kumuh (terutama untuk ibu-ibu PKK) seperti menyulam, anyaman, bengkel, kerajinan dari barang bekas berada jauh dari pemukiman kumuh.

Adapun tingkat kepentingan pemecahan masalah yang disampaikan didasarkan besarnya frekuensi pemecahan masalah tersebut disampaikan. Artinya semakin sering pemecahan disampaikan, menunjukkan semakin penting dan prioritas pemecahan masalah tersebut menurut narasumber. Dengan demikian maka dapat dihitung bobotnya berdasarkan perbandingan antara frekuensi dengan jumlah narasumber.

**TABEL IV.2**  
**DISTRIBUSI PRIORITAS PEMECAHAN MASALAH PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH KEMAYORAN JAKARTA PUSAT**

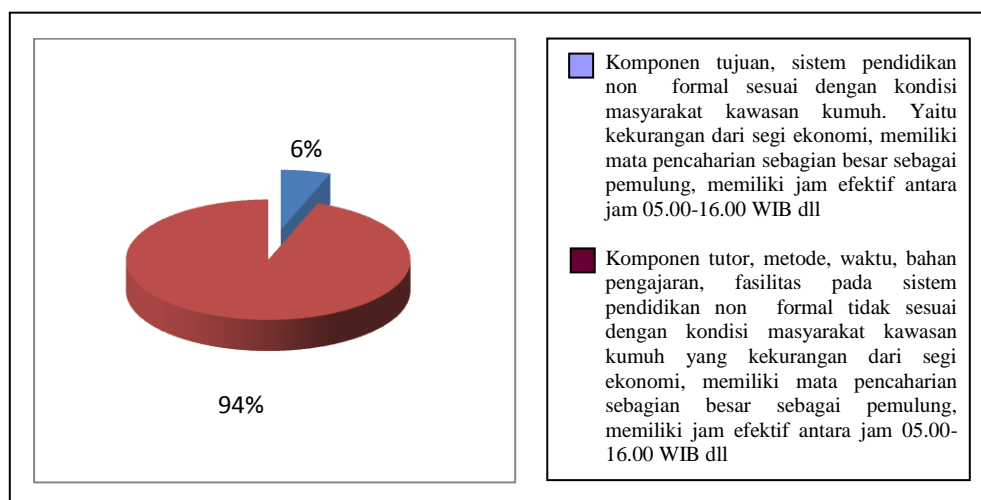
No	Model jawaban	frek	Bobot
1	Diperlukan suatu lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada kawasan kumuh di Kemayoran Jakarta Pusat, baik program, waktu pelaksanaan, metode, tutor, sarana prasarana, yaitu program keahlian anyaman, menyulam, bengkel, kerajinan dari barang bekas, waktu pelaksanaan antara jam 16.00-22.00 WIB.	15	71 %
2	Adanya bantuan dana kepada masyarakat yang berada di kawasan kumuh, sehingga masyarakat dapat membayar biaya pendidikan non formal yang ada, seperti beasiswa kepada masyarakat kurang mampu.	5	24 %
3	Lembaga pendidikan non formal yang ada, seharusnya menurunkan biaya kursus atau memberikan potongan kepada masyarakat miskin, atau kalau memungkinkan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat miskin di wilayahnya.	3	14 %
4	Waktu pelaksanaan kegiatan pendidikan non formal yang ada di lingkungan tersebut di lakukan antara pukul 16.00-22.00 WIB, sehingga tidak terjadi bentrok dengan waktu masyarakat bekerja pada siang hari.	4	5 %

5	Memberikan penyuluhan kepada orang tua anak didik untuk menimbulkan kesadaran masyarakat tentang perlunya pendidikan non formal	1	5 %
6	Adanya sanksi kepada masyarakat yang tidak mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan non formal	1	5 %
7	Usaha peningkatan pendapatan kepada masyarakat pada kawasan kumuh, sehingga masyarakat dapat mengalokasikan anggarannya ke anggaran pendidikan.	2	10 %
8	Pemerintah mendirikan lembaga pendidikan non formal berada dikawasan kumuh ini, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti program-programnya dengan tidak memungut biaya sepeserpun.	2	10 %

Sumber: Hasil Analisis, 2008

Dari perhitungan diperoleh bahwa frekuensi tertinggi untuk pemecahan masalah adalah= 15 dan bobotnya 71%. Dengan model jawaban diperlukan suatu lembaga pendidikan non formal yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, baik program, waktu pelaksanaan, metode, tutor, dan sarana prasarana. Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, merupakan pemecahan yang tepat diterapkan pada lembaga pendidikan non formal yang ada.

Kondisi yang dapat diperhatikan bahwa hanya satu komponen sistem pendidikan non formal yang sesuai dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh di Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan sisanya menyatakan ketidaksesuaian. Hal ini disebabkan karena kemauan masyarakat kawasan kumuh di kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah pendidikan non formal yang memiliki program bengkel, las, anyaman, keterampilan barang bekas, dengan waktu pelaksanaan antara pukul 16.00-22.00 WIB, dengan tutor yang sangat menguasai materi dan fasilitas yang berfungsi baik untuk digunakan bahan praktek. Jenis sistem pendidikan yang seperti ini disebut dengan sistem pendidikan non formal yang mendasarkan pada pelayanan. Secara jelasnya dapat diperhatikan gambar IV.16 dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis, 2008

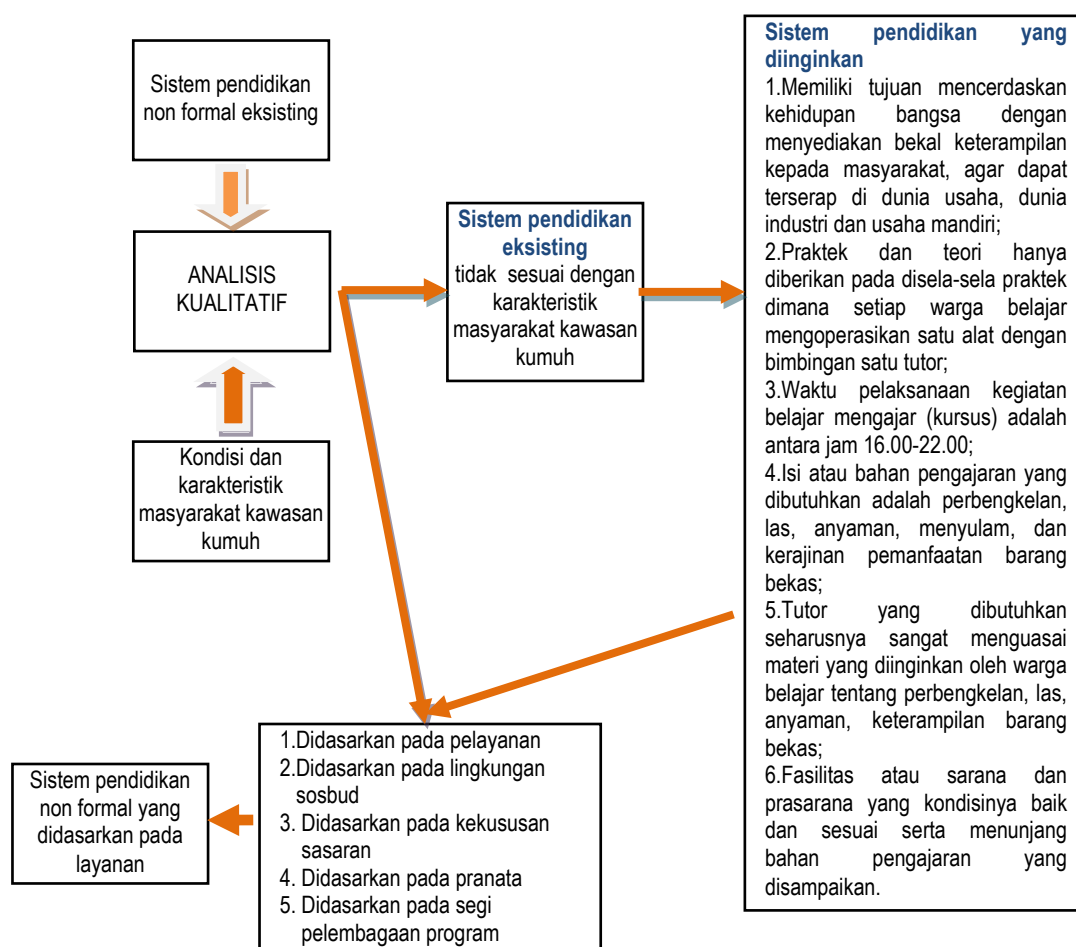
**GAMBAR 4.12**  
**PENDAPAT NARA SUMBER TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NON FORMAL PADA KAWASAN KUMUH**

Dari gambar diatas, jelas dapat disimpulkan bahwa 94% komponen sistem pendidikan non formal pada kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat eksisting tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakatnya.

Dalam hal ini pelayanan yang diinginkan adalah:

1. Memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyediakan bekal keterampilan kepada masyarakat, agar dapat terserap di dunia usaha, dunia industri dan usaha mandiri;
2. Teori hanya diberikan pada disela-sela praktek dimana setiap warga belajar mengoperasikan satu alat dengan bimbingan satu tutor;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (kursus) adalah antara jam 16.00-22.00 WIB;
4. Isi atau bahan pengajaran yang dibutuhkan adalah perbengkelan, las, anyaman, menyulam, dan kerajinan pemanfaatan barang bekas;
5. Tutor yang dibutuhkan seharusnya sangat menguasai materi yang diinginkan oleh warga belajar tentang perbengkelan, las, anyaman, keterampilan barang bekas;
6. Fasilitas atau sarana dan prasarana yang kondisinya baik dan sesuai serta menunjang bahan pengajaran yang disampaikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.12 bagan sistem pendidikan di bawah ini:



**GAMBAR IV.13**  
**BAGAN SINTESIS HASIL ANALISIS**

*Sumber: Hasil analisis peneliti 2008*

Sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada layanan adalah sistem pendidikan non formal yang bersifat melayani. Artinya lembaga pendidikan non formal tersebut bertujuan untuk melayani masyarakat sekitarnya baik program, tujuan, metode, waktu pelaksanaan, kenyamanan, karakteristik dan kondisi masyarakat. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena pemerintah telah membuat kebijakan yang disebut dengan manajemen berbasis sekolah, dimana sekolah diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengelola lembaga pendidikannya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kepatutannya sendiri, dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada.

### **KESIMPULAN SARAN DAN REKOMENDASI**

Sistem pendidikan non formal yang ada di kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah, sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada lingkungan sosial budaya, yaitu suatu sistem pendidikan non formal yang programnya disesuaikan dengan lingkungan sosial budayanya. Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat adalah lokasi yang berada di kota, maka program yang diberikan adalah program diarahkan pada program-program yang cepat terkena dampak perkembangan ilmu dan teknologi. Padahal dengan kondisi masyarakat kawasan kumuh yang serba kekurangan, tidak memungkinkan untuk mengikuti program tersebut. Masyarakat kawasan kumuh lebih dapat mengakses lembaga pendidikan non formal yang programnya selalu mengikuti kebutuhan dan kemauan masyarakat kawasan kumuh.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

A. Bagi instansi pemerintah terkait Dinas Pendidikan Jakarta Pusat; (1) Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada masyarakat kawasan kumuh Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, bisa ditempuh melalui pembuatan kebijakan yang diarahkan kepada lembaga pendidikan non formal yang ada, seyogyanya merubah sistem pendidikan yang selama ini dipakai dengan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan; (2) Melakukan pembinaan (suporting) kepada lembaga pendidikan non formal yang ada agar kiranya lembaga tersebut mampu dan sanggup untuk melaksanakan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan, karena mesti membutuhkan sumber daya yang sangat besar.

B. Bagi pelaksana atau lembaga pendidikan non formal. (1). Dalam jangka pendek, menerapkan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan dengan kemampuan yang ada; (2). Dalam jangka panjang membuat persiapan untuk melaksanakan sistem pendidikan non formal yang didasarkan pada pelayanan secara menyeluruh, dengan harapan semua masyarakat usia sekolah di kawasan kumuh dapat tertampung semua di lembaga pendidikan non formal.

C. Bagi peneliti lain:

Studi ini hanya mengidentifikasi keadaan atau analisis situasi serta mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam kaitannya dengan struktur ruang dimana masyarakat kawasan kumuh berada. Tahap ini hanya merupakan langkah pertama dari penyusunan kebijakan. Untuk menyusun kebijakan mengenai sistem pendidikan yang sesuai dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada kawasan kumuh secara komprehensif sebagai suatu arahan pengembangan pendidikan di Jakarta, diperlukan studi lanjutan yang mengkaji peluang dan tantangan berkaitan dengan kebutuhan pengembangan sistem pendidikan tersebut, kemudian menetapkan alternatif pencapaian tujuan, identifikasi kebijakan atau kegiatan serta penetapan rencana.



## RIWAYAT HIDUP



**BUDIYONO** dilahirkan di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 1968, sebagai anak ke dua dari tiga bersaudara keluarga Subari dan Marinah alm. Masa kecil dilaluinya dengan berpindah-pindah tempat tinggal sebanyak enam kali karena aktivitas dan keadaan orangtua, sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kini setelah berkeluarga tinggal di Jakarta Timur - Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Masa pendidikan diawali di pendidikan dasar, SD Negeri Karangsono I, Kabupaten Trenggalek lulus pada tahun 1982. Pendidikan Menengah Pertama ditempuh di SMP Negeri I Trenggalek lulus pada tahun 1985, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri I Trenggalek pada jurusan A1/Fisika lulus tahun 1988. Kemudian menyelesaikan pendidikan Sarjana di Universitas Negeri Jember Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan MIPA Program Pendidikan Matematika lulus tahun 1993. Pada tahun 1993 pernah mengikuti lomba inovatif produktif antar kampus seluruh Indonesia di ITB dan Universitas Pajajaran Bandung. Pada tahun 2006 penulis memperoleh beasiswa unggulan dari Departemen Pendidikan Nasional untuk melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, konsentrasi Perencanaan Prasarana Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman kerja diawali sejak tahun 1995 setelah lulus sarjana, sebagai eksekutif analisis PT. Graha Trada Abadi, kemudian akhir tahun 1995 pindah ke PT. Frank Small Associates Indonesia sebagai Data Processing hingga tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 1996 bekerja pada PT. Bank Papan Sejahtera sebagai Card Management Support sampai dengan tahun 1998, dimana pada tahun tersebut Bank Papan Sejahtera di likuidasi. Selanjutnya karir di pemerintahan dimulai sejak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Oktober tahun 1998 sebagai staf pengajar bidang studi Matematika di SMAN 4 Jakarta Pusat. Namun penulis bekerja di SMAN 4 Jakarta sejak Januari 1999 sampai dengan bulan September tahun 2003, selanjutnya pada tahun yang sama dipindah tugaskan di kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai pembantu pimpinan pada seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, belum sampai sebulan bertugas di seksi tersebut, penulis kembali dipindah tugaskan ke seksi Perencanaan Penyusunan Program Pelaporan dan Akreditasi, kemudian dipindah tugaskan kembali ke Subbag Tata Usaha sampai sekarang.

Dari pernikahan dengan Anggun Cahyani, S.Psi pada tanggal 18 November tahun 2004, kini telah dikaruniai seorang buah hati bernama, Elang Arka Manggala yang lahir pada tanggal 19 September 2007.

**BUKU-BUKU**

- Ahmadi, Abu dan Uhbiyanti, Nur. 2003. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Arikunto. 1998. *Teknik Penulisan Ilmiah*, Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada Press.
- Ananda, 2005. *Konsep Pendidikan Seumur Hidup*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Bintarto. 1987. *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bourne, Larry S. 1982. *Urban Transport Spatial Structure* , In Larry S. Bourne (ed). *Interna Structure Of The City*. New York : Oxford University Press.
- Budihardjo, Eko. 1997a. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Hardjosudarmo, Soedigdo. 1981. *Pendidikan Non Formal dalam Rangka Pengembangan Sumber Tenaga Usia Muda*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Hamalik, Omar. 2005. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Harold, Bathell. 1993. *Rural Community Development*. New York:Rinahart and Company
- Hasan, Fuad. 2005. *Pendidikan Non Formal di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia.
- Herlianto. 2002. *Urbanisasi Pembangunan, dan Kerusakan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hoogerwerf. 1994. *Forest Policy in Charles B. Howe (eds.) Managing Renewable Natural Resources in Developing Country*. Colorado : Westview Press/Boulder.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Penerbit CV. Niandar Jaya.
- Kusmayadi, Endar Sugiarto. 2000. *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, Parsudi (penyunting), 1996. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia (YOI).
- Suprpto. 1995. *Pendidikan Kontemporer*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Surbakti, A. Ramlan. 1984. " *Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung*". Prisma, No. 6, tahun 1984. Jakarta : Penerbit LP3ES..
- Wahab. 2002. *culture and social science*, Sixth edition, alih bahasa oleh Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Winardi. 2002. *Jalur-jalur di Luar Pendidikan Formal*, Jakarta : Penerbit Bharata.
- Wirartha, 2006, *Teknis Menulis Ilmiah*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia.

**TERBITAN TERBATAS**

- Badan Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Data Pokok Jakarta Pusat Tahun 2007*. Jakarta : Penerbit Bapekodya Jakarta Pusat.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 1984. *Kebijakan Pendidikan Nasional*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 2007. *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Pendidikan Luar Sekolah tahun 2007*. Departemen Pendidikan Nasional
- Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat. 2007. *Rangkuman Data Rinci SMA dan SMK se Jakarta Pusat* . Jakarta Pusat: Penerbit Sudin Dikmenti Kota Administrasi Jakpus.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 1989 Jakarta